

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Definisi ini menegaskan bahwasannya desa memiliki kedudukan hukum yang jelas dan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan desa kemudian diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Desa berada di wilayah kabupaten dan kota, dalam pengelolaannya menggunakan konsep desentralisasi yang didefinisikan sebagai pemindahan tanggung jawab administrasi dan kewenangan politik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan entitas lokal (Handraini, H. dkk, 2024). Pada Pasal 1 angka 1 UU.Desa disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik .

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris desa, Kepala-kepala urusan dan Kepala dusun. Pemerintah desa memiliki tugas dan fungsi yang

diatur dalam UU Desa Pasal 2 meliputi menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari berbagai tugas tersebut, pembangunan desa merupakan aspek penting yang salah satu wujud nyatanya adalah pembangunan infrastruktur. Karena hal ini berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup. Infrastruktur desa antara lain adalah jalan, jembatan, drainase, dan air bersih. Hal tersebut menjadi pondasi utama dalam menunjang kelancaran aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan desa tidak dapat dilepaskan dari pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat.

Secara konseptual, pembangunan dapat dipahami sebagai proses perubahan yang terjadi secara terarah menuju kondisi yang lebih baik, berdasarkan indikator atau tolok ukur tertentu. Pembangunan memainkan peran penting dalam menentukan arah politik dan masa depan suatu negara. Oleh karena itu, keberhasilan proses pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang dirancang secara sistematis, melibatkan beragam pemangku kepentingan, dan berkelanjutan. Di tingkat desa, implementasi pembangunan melibatkan dua aktor utama: masyarakat dan pemerintah. Keduanya memainkan peran penting dalam keberhasilan pembangunan, baik secara fisik, seperti penyediaan infrastruktur dan layanan publik, maupun dalam pengembangan lembaga yang mendukung tata kelola desa. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa umumnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan lokal, seperti perumahan, usaha mikro, dan sektor informal lainnya. Di sisi lain, pemerintah desa cenderung menitikberatkan

pembangunan pada penyediaan fasilitas fisik dan kelembagaan yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pembangunan desa merupakan salah satu komponen strategis dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Tujuan utama dari pembangunan desa tidak hanya sebatas pada pemenuhan kepentingan masyarakat lokal, tetapi juga berkaitan erat dengan kepentingan di tingkat kabupaten dan provinsi. Hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan antara kondisi desa dan dinamika yang terjadi pada tingkat regional, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik, maupun kebutuhan pasar. Dengan demikian, pembangunan desa harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional.

Demikian, pembangunan desa harus dilaksanakan secara terencana dan terarah, sesuai dengan visi dan tujuan awal yang telah ditetapkan. Keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur dari output fisik yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dan memperkuat struktur sosial-ekonomi desa secara berkelanjutan khususnya dalam pembangunan infrastruktur desa. (Setiawan, F. 2023)

Menurut Simbolon, dkk (2021) Infrastruktur berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan, dll. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan khususnya di wilayah pedesaan.

Dengan infrastruktur yang memadai menjadi fondasi utama bagi aktivitas ekonomi masyarakat, seperti transportasi, perdagangan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Simbolon et al., 2021)

Perencanaan pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu proses yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga masyarakat secara partisipatif untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya desa guna mencapai tujuan pembangunan desa. Proses ini menjadi lebih sistematis setelah diberlakukannya UU Desa yang menekankan pentingnya perencanaan yang terstruktur dan terpadu dalam pembangunan desa. Sebelumnya, perencanaan pembangunan desa sudah dianjurkan, tetapi banyak desa yang kesulitan untuk melaksanakannya dengan baik secara sistematis. Setelah adanya Undang-Undang Desa, semangat "satu desa, satu perencanaan, dan satu penganggaran" mulai diterapkan (Hendri, 2022). Ini berarti semua perencanaan, baik dari partisipasi masyarakat, aspek politis, maupun sektor lainnya, harus merujuk pada perencanaan pembangunan desa yang didokumentasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Kondisi pembangunan infrastruktur di Desa Tambun mencerminkan adanya kebutuhan yang terus meningkat terhadap penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memadai guna menunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik masyarakat desa. Sebagai wilayah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi serta dinamika pembangunan yang berkembang.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, peneliti menemukan hambatan bahwasannya sejak 3 tahun terakhir Pemerintah Desa Tambun menetapkan prioritas pembangunan yang berfokus pada peningkatan infrastruktur desa, khususnya pada aspek perbaikan dan pembangunan jalan desa serta sistem drainase. Prioritas ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sarana transportasi yang memadai serta sistem pengelolaan air yang efektif. Namun demikian, meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kondisi infrastruktur di Desa Tambun secara umum masih belum berfungsi secara optimal. Hal ini ditunjukkan masih adanya keluhan dari warga terkait kualitas jalan yang belum merata perbaikannya, serta sistem drainase yang meskipun telah ditenahi, belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan banjir di sejumlah wilayah. Titik rawan banjir akibat sistem drainase yang belum optimal pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1



Sumber : Dokumentasi Peneliti

Beberapa wilayah Desa Tambun saat curah hujan tinggi, seperti di RT 001/RW 008. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas drainase di beberapa titik belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan adanya tantangan strategis

yang perlu dianalisis lebih lanjut terkait strategi pemerintah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Perbaikan sistem drainase relatif baru dilaksanakan karena permasalahan banjir di Desa Tambun bersifat mendesak dan memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas warga. Beberapa wilayah desa diketahui termasuk dalam kategori daerah rawan banjir, yang disebabkan oleh kombinasi faktor curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis wilayah yang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Keadaan ini menyebabkan aliran air hujan sering terhambat dan menggenangi permukiman warga. Oleh karena itu, perbaikan dan pengembangan infrastruktur, baik jalan desa maupun sistem drainase, menjadi salah satu fokus utama pemerintah desa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendukung kelancaran aktivitas sosial-ekonomi di wilayah tersebut.

Selain itu, Desa Tambun juga menghadapi permasalahan lingkungan terkait pemanfaatan lahan pembuangan sampah yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Kepala Desa berinisiatif mengkoordinasikan aparat desa untuk melakukan penataan dan pembenahan lahan, yang kemudian diwujudkan dalam sebuah program pembangunan infrastruktur berupa taman terbuka ramah anak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat melalui penyediaan ruang hijau yang terawat, mendorong aktivitas fisik, memperkuat interaksi sosial, serta meningkatkan citra desa. Inisiatif ini juga diharapkan dapat mendukung perbaikan tata kelola keuangan desa, menangani isu-isu sosial, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat serta

nyaman bagi warga. Berikut dokumentasi sebagai bagian dari strategi pemerintah desa tambun penataan lahan menjadi Taman Desa Ramah Anak pada gambar 1.2 dibawah ini :

Gambar 1.2



Sumber : Dokumentasi Desa Tambun (Taman Desa), 2024

Upaya – upaya tersebut tidak hanya berfokus pada penyelesaian permasalahan lokal yang bersifat mendesak, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan desa secara berkelanjutan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dengan demikian, program-program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat peran desa dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan pembangunan di Desa Tambun dilaksanakan secara terukur melalui pendekatan terintegrasi yang menyelaraskan tahapan perencanaan, penganggaran, hingga implementasi proyek pembangunan. Seluruh program yang

dijalankan harus merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan guna memastikan setiap langkah memiliki arah yang jelas dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola sumber daya desa, Pemerintah Desa Tambun telah merinci alokasi anggaran dan jenis kegiatan yang menjadi fokus utama dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rincian mengenai distribusi anggaran untuk berbagai bidang, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan hingga penanggulangan bencana pada Tahun Anggaran 2024, disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini:

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024 Tambun secara rinci disajikan dalam Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tambun Tahun 2024

No	Bidang / Sub Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Prakiraan Biaya	Presentase	Sumber Dana
I	II	III	IV	V	VI
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Perangkatnya	182.400.000,00 5.000.000.00 25.000.000.00	49,05%	- ADD - PAD - PBP
		Penyediaan Intensif /operasional RT/RW	672.000.000,00		ADD
		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	240.000.000,00		PBH

I	II	III	IV	V	VI
Jumlah Per Bidang			1.124.400.000,00		
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	• Pemeliharaan gorong-gorong, selokan, drainase dan parit.	• 35.000.000,00	50.95%	• DDS
		• Pembangunan dan pengerasan jalan lingkungan permukiman.	• 300.000.000.00		• DDS
		• Rehabilitasi dan peningkatan fasilitas balai desa/kemasya rakatan	• 60.000.000.00		• PBH
		• Pemeliharaan sanitasi pemukiman melalui perbaikan saluran air dan selokan (diluar prasarana jalan)	• 50.000.000,00		• DDS
		• Penyelenggaran media informasi publik desa (poster, baliho, dll)	• 3.000.000,00		• PBP
		Jumlah Per Bidang			448.000.000,00

I	II	III	IV	V	VI
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	• Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Keterlibatan oleh Pemdes	• 40.000.000,00	4,44%	• ADD
		• Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	• 15.000.000,00		• DDS
		• Penyelenggaraa n Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	• 15.000.000,00		• PBH
		• Penyelenggaraan Festival / lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	• 15.000.000,00		• ADD
		• Pembinaan PKK	• 8.000.000,00		• PBH
		• Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakata n	• 5.000.000,00		• PBH
		Jumlah Per Bidang			98.000.000,00

I	II	III	IV	V	VI
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Prikanan Darat Milik Desa	• 50.000.000,00	14,83%	• DDS
		• Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	• 40.000.000,00		• DDS
		• Peningkatan Produksi Peternakan	• 40.000.000,00		• DDS
		• Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	• 30.000.000,00		• PBH
		• Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	• 50.000.000,00		• PBH
		• Peningkatan Kapasitas BPD	• 40.000.000,00		• PBH
		• Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	• 40.000.000,00		• PBH
		• Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	• 37.311.200,00		• PBH
Jumlah Per Bidang			327.311.200,00		

I	II	III	IV	V	VI
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	• Kegiatan Penanggulangan Bencana	• 100.000.000,00	9,06%	• DDS
		• Penanganan Keadaan Mendesak	• 100.000.000,00		• DDS
		Jumlah Per Bidang			200.000.000,00

Sumber : RKPDes Tambun, 2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tambun Tahun 2024, prioritas utama dialokasikan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan total anggaran mencapai Rp1.124.400.000,00 atau sebesar 49,05% dari total rencana belanja. Anggaran dalam bidang ini difokuskan pada pemenuhan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa beserta perangkatnya, insentif operasional RT/RW, serta tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PAD), dan Bagi Hasil Pajak (PBH).

Selanjutnya, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mendapatkan alokasi sebesar Rp448.000.000,00. Fokus utama pada bidang ini adalah pembangunan infrastruktur fisik, khususnya pengerasan jalan lingkungan permukiman dengan nilai Rp300.000.000,00, serta pemeliharaan saluran drainase, gorong-gorong, dan sanitasi permukiman guna menunjang kualitas lingkungan warga. Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur ini mayoritas bersumber dari Dana Desa (DDS).

Untuk sektor pemberdayaan dan pembinaan, pemerintah desa mengalokasikan Rp327.311.200,00 (14,83%) untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang mencakup peningkatan kapasitas perangkat dan lembaga desa, serta penguatan ketahanan pangan melalui sektor perikanan dan peternakan. Sementara itu, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dianggarkan sebesar Rp98.000.000,00 (4,44%) untuk kegiatan penguatan tenaga keamanan, kesenian, dan kepemudaan. Terakhir, pemerintah desa juga mencadangkan dana sebesar Rp200.000.000,00 (9,06%) untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak sebagai langkah antisipatif terhadap situasi tidak terduga di wilayah Desa Tambun.

Dengan menerapkan pendekatan terintegrasi, yakni pendekatan yang bersifat menyeluruh serta menekankan keterkaitan antarbagian, pembangunan infrastruktur di desa dapat ditingkatkan secara komprehensif. Seluruh tahapan pelaksanaan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga implementasi proyek pembangunan, harus disusun dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dengan demikian, setiap langkah pembangunan memiliki arah dan tujuan yang jelas serta selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. (Laia et al., 2024)

Dalam rangka merealisasikan program pembangunan yang telah direncanakan, Pemerintah Desa Tambun telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) pada Tahun Anggaran 2024 sebagai instrumen pendanaan utama. Gambaran umum mengenai komposisi pendapatan dan belanja desa tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambun Tahun 2024**

No	Sumber Pendapatan	Anggaran
1.	Pendapatan Asli Desa • Pendapatan Asli Desa • Pendapatan Transfer • Dana Desa • Bagi Hasil Pajak dan Retribusi • Alokasi Dana Desa • Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 50.000.000 Rp. 1.354.709.000 Rp. 1.626.121.200 Rp. 1.504.681.000 Rp. 130.000.000
Total Pendapatan		Rp. 4.665.511.200
2.	Belanja Desa • Belanja Pegawai • Belanja Barang dan Jasa • Belanja Modal • Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.162.500.000 Rp. 2.287.606.200 Rp. 975.005.000 Rp. 140.400.000
Total Belanja		Rp. 4.565.511.200
Surplus / Defisit		Rp. 100.000.000,00
3.	Pembiayaan a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 00,00 Rp. 100.000.000,00

Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambun Tahun 2024

Berdasarkan ketersediaan anggaran di atas, rincian program kerja yang menjadi prioritas pembangunan desa untuk periode 2024 dijabarkan secara spesifik dalam Tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3

Rencana Pembangunan Infrastruktur di Desa Tambun Tahun 2024

No	Prioritas Pembangunan Infrastruktur	Jenis Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jumlah	Keterangan
1.	Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Jalan Desa	• Pemeliharaan gorong-gorong, selokan, drainase, dan parit.	RT 05/ RW 06	Dana Desa	• 165.000.000.00	Terealisasi
		• Pembangunan dan pengerasan jalan lingkungan permukiman.			• 300.000.000.00	
2.	Rehabilitasi dan Peningkatan Balai Desa atau Balai Kemasyarakatan	• Rehabilitasi dan peningkatan fasilitas balai desa/kemasyarakatan	Taman Desa	Alokasi Dana Desa	• 60.000.000.00	Terealisasi
3.	Aspek Lingkungan & Sanitasi	• Pemeliharaan sanitasi pemukiman melalui perbaikan saluran air dan selokan (diluar prasarana jalan)	RT 05/ RW 07	Dana Desa	• 50.000.000,00	Terealisasi
4.	Transparansi & Partisipasi	• Penyelenggaraan media informasi publik desa (poster, baliho, dll)	Kantor Desa Tambun	Pendapatan Bantuan Provinsi	• 3.000.000,00	Terealisasi

Sumber : Rencana Pembangunan Infrastruktur di Desa Tambun Tahun 2024

Tabel 1.3 menggambarkan Rencana Pembangunan Infrastruktur Desa Tambun Tahun 2024 yang mencakup empat prioritas utama pembangunan desa. Prioritas pertama adalah perbaikan dan peningkatan kualitas jalan desa, dengan

jenis kegiatan berupa pemeliharaan gorong-gorong, selokan, drainase, dan parit, serta pembangunan dan pengerasan jalan lingkungan permukiman. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah RT 05/RW 06, bersumber dari Dana Desa, dengan anggaran sebesar Rp• 165.000.000,00 untuk pemeliharaan dan Rp300.000.000,00 untuk pembangunan jalan, dan telah terealisasi.

Prioritas kedua yaitu rehabilitasi dan peningkatan Balai Desa atau Balai Kemasyarakatan. Kegiatan difokuskan pada rehabilitasi serta peningkatan fasilitas balai desa yang berlokasi di Taman Desa, dengan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp60.000.000,00 dan telah terealisasi.

Prioritas ketiga mencakup aspek lingkungan dan sanitasi, dengan kegiatan pemeliharaan sanitasi permukiman melalui perbaikan saluran air dan selokan di luar prasarana jalan. Kegiatan ini dilaksanakan di RT 05/RW 07, bersumber dari Dana Desa, dengan jumlah anggaran sebesar Rp50.000.000,00, dan telah terealisasi.

Prioritas keempat adalah transportasi dan partisipasi, yang diwujudkan melalui penyelenggaraan media informasi publik desa, seperti poster dan baliho. Kegiatan ini berlokasi di Kantor Desa Tambun, didanai dari Pendapatan Bantuan Provinsi, dengan anggaran sebesar Rp300.000,00, dan telah terealisasi.

Secara keseluruhan, keterkaitan antara RPJMDes, RKPDes, dan APBDes Desa Tambun menunjukkan alur pembangunan yang konsisten. RPJMDes menetapkan arah strategis jangka panjang, yang kemudian diturunkan menjadi rencana operasional dalam RKPDes. Seluruh rencana tersebut didukung penuh oleh

alokasi anggaran dalam APBDes 2024, sehingga setiap pembangunan infrastruktur memiliki landasan perencanaan dan ketersediaan dana yang akuntabel.

Pembangunan infrastruktur di desa merupakan hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali partisipasi aktif masyarakat desa kurang dilibatkan, padahal hal ini seharusnya menjadi salah satu aspek utama yang diatur dalam peraturan terkait (Nuraisyah et al., 2022). Secara umum, model pembangunan infrastruktur desa cenderung bersifat top-down, yakni proses pengambilan keputusan dan perencanaan lebih banyak ditentukan oleh pihak-pihak pada tingkat administratif yang lebih tinggi tanpa mempertimbangkan secara optimal masukan maupun kebutuhan riil masyarakat desa itu sendiri. Hal ini sering kali mengakibatkan ketidaksesuaian antara infrastruktur yang dibangun dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat lokal. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur desa juga dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman akan hak-hak serta peran aktif mereka dalam proses pembangunan, serta kendala-kendala seperti kurangnya akses informasi, minimnya keterampilan partisipasi, dan kurangnya kesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan. (Fina, 2024).

Melihat pentingnya pembangunan desa secara menyeluruh, aspek infrastruktur menjadi salah satu fokus utama karena berfungsi sebagai penunjang utama aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, banyak desa menghadapi tantangan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Kondisi ini juga terjadi di Desa Tambun, meskipun

telah menetapkan prioritas pembangunan, hambatan tetap terjadi sehingga berpengaruh pada efektivitas pembangunan.

Berdasarkan data awal yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Tambun di kantor Desa Tambun pada tanggal 28 Juli 2025, terdapat hambatan besar yang dihadapi oleh pemerintah desa tambun dalam pembangunan infrastruktur yakni :

1. Ketersediaan lahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program masih mengalami kendala, terutama disebabkan oleh kondisi lingkungan yang sangat padat. Contoh konkritnya pada beberapa titik, saluran air yang ada memiliki lebar yang tidak memadai sehingga sering menyebabkan genangan saat curah hujan tinggi. Namun, upaya pelebaran saluran tersebut mengalami hambatan karena lahan di sekitarnya merupakan milik warga dan telah digunakan sebagai bangunan rumah maupun tempat usaha. Kondisi ini menyebabkan pemerintah desa kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan, sehingga pembangunan infrastruktur drainase tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan oleh dominasi penduduk pendatang yang secara sosiologis memiliki orientasi utama pada aktivitas ekonomi, sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial dan pembangunan lingkungan menjadi terbatas. Contoh konkritnya terlihat pada kegiatan gotong royong perbaikan lingkungan dan pembangunan sarana umum desa, seperti perbaikan jalan lingkungan atau pembersihan saluran air. Sebagian besar warga pendatang di Desa Tambun lebih memprioritaskan aktivitas ekonomi dan pekerjaan harian mereka, sehingga tingkat kehadiran dalam

kegiatan musyawarah desa maupun kerja bakti relatif rendah. Akibatnya, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi terbatas, yang berdampak pada kurang optimalnya hasil pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan fasilitas umum.

Oleh karena itu dengan adanya fenomena yang terjadi dapat mengetahui bahwa pemerintah desa memiliki peran yang sangat vital sebagai garda terdepan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi tantangan tersebut, baik melalui Perencanaan Tata Ruang, Pemberdayaan Masyarakat, dan juga pentingnya koordinasi antar instansi pemerintah dengan masyarakat agar pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan. Lalu dengan adanya hambatan besar di atas yang juga memerlukan solusi strategis dan pengelolaan yang baik agar tidak menjadi sebuah hambatan yang lebih serius di masa depan. Alasan mengapa peneliti memilih lokasi di Desa Tambun, untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam peningkatan infrastruktur, sekaligus mengidentifikasi hambatan, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tambun di Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas di atas, adanya perumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi ?
2. Hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk mengatasi hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis strategi pemerintah desa Tambun dalam pembangunan infrastruktur.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa Tambun dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa Tambun dalam mengatasi hambatan pembangunan infrastruktur.

1.4 Signifikansi penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan. Melalui penelitian ini, peneliti menganalisis kebijakan, strategi, serta upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam merealisasikan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti membawa judul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi”, dalam penelitian ini peneliti tentunya melihat dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan oleh masyarakat dalam konteks pembangunan infrastruktur dalam resume atau jurnal dan hal tersebut menjadi sumber yang memang membantu dalam proses penelitian ini.

Untuk memperkuat landasan teori serta memperjelas posisi penelitian ini, peneliti meninjau beberapa literatur terdahulu yang relevan dengan topik “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur”. Telaah literatur ini disajikan dalam bentuk tabel untuk menunjukkan kontribusi akademik sumber serta relevansinya terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Yang disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
I	II	III	IV	V
1.	Suharto, & Dewi Maryam (2023)	Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa, Duwet, Bojong, Kabupaten Pekalongan	Kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.	Mendeskripsikan beberapa hal yang mencakup parameter yang digunakan dalam mengukur peran pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, kinerja serta masalah-masalah dalam pembangunan infrastruktur Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.
2.	Mayora, & dkk (2025)	Strategi Peningkatan Infrastruktur Desa untuk Mendorong Perekonomian di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa	Kualitatif Deskriptif	Menunjukkan bahwa strategi peningkatan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan fasilitas publik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perencanaan dan pengelolaan infrastruktur yang efektif untuk mendorong perekonomian di Desa Limau Manis.
3.	Eva Monica, dkk (2022)	Strategi Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur di Rancaasih Kecamatan Patok Beusi Kabupaten Subang	Kualitatif deskriptif	Dari dimensi Tujuan dan Sasaran Pemerintah Desa Rancaasih memprioritaskan anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur, kondisi lingkungan di Desa Rancaasih cukup mendukung secara penerimaan manfaat. Terkait kemampuan internal Pemerintah Desa Rancaasih ini memang dari segi perencanaan dan strategi awal itu sudah matang dan siap untuk melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur.

I	II	III	IV	V
4.	Nihla, dkk (2024)	Strategi Pemerintah Desa Mendukung Pembangunan Jalan di Desa Ogolali Kecamatan Dampal Utara Kabupaten Tolitoli	Kualitatif deskriptif	Bahwa aspek strategi organisasi sudah terpenuhi, dimana tujuan pembangunan infrastruktur jalan dianggap dapat membantu perekonomian masyarakat. Pada aspek strategi program dan aspek sumber daya belum terpenuhi dikarenakan belum adanya dukungan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, sehingga perencanaan program yang telah disusun tidak dapat terealisasi dengan baik.
5.	Siprianus Umbuay (2022)	Strategi Pemerintah Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu, Kota Batu)	Kualitatif deskriptif	Strategi pemerintah desa Sidomulyo telah berhasil dilakukan berdasarkan hasil rumusan melalui perumusan hingga keputusan dari berbagai aspirasi lewat berbagai macam pertemuan seperti musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes), dan jalan merupakan salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di desa. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan akan tetapi pemerintah sudah cukup melaksanakannya, untuk itu perlu ditingkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.
6.	Dewi Sarah Simbolon, dkk (2021)	Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur	Pendekatan studi kepustakaan	Mengenai peran pemerintah desa dalam pembangunan dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai peran yang kurang baik karena aparat desa kurang mengoptimalkan peran nya yang menimbulkan macetnya suatu pembangunan desa, disebabkan pemerintah desa

I	II	III	IV	V
				belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dipengaruhi kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan perangkat desa lainnya, dan kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsinya sebagai pemerintah desa atau kepala desa.
7.	Fina Rahmasari, dkk (2024)	Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Gunung Agung Kabupaten Lampung Tengah)	Pendekatan Kualitatif	Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) berperan membantu pemerintah Kampung dalam menyusun program aktif pembangunan. Pemerintah Kampung beserta BPK merumuskan program pembangunan Kampung, dalam hal ini menyusun pembangunan yang sifatnya mendesak dan harus dilakukan segera dalam arti menyusun skala prioritas, ini menunjukkan bahwa di Desa Gunung Agung, evaluasi dan pengendalian fokus pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
8.	Nor Azizah, dkk (2021)	Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala	Kualitatif studi kasus menggunakan analisis SWOT	Mengidentifikasi strategi pengelolaan dana desa di Desa Semangat Dalam dengan memaksimalkan dana bantuan supaya dapat meningkatkan aspek di bidang ekonomi dan memanfaatkan SDM yang cukup potensial, menjalin kerjasama yang kooperatif antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan, serta menciptakan lapangan kerja.

I	II	III	IV	V
9.	Anggun Sasmita, & Syapril Abdullah (2024)	Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan	Kualitatif Deskriptif	Pemerintah Desa Tanjung Beringin telah berupaya menjalankan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan berbagai potensi lokal yang menjadi modal utama, seperti ketersediaan SDA (tanah, air, kayu), keberadaan tenaga kerja lokal, serta semangat gotong royong masyarakat. Pihak desa juga telah memulai pelaksanaan pembangunan seperti, pelapisan jalan semenisasi untuk memperbaiki aksesibilitas warga. Namun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang, menghambat kelancaran pembangunan yaitu keterbatasan anggaran yang menjadi masalah utama, sehingga menyebabkan beberapa proyek seperti, pembangunan taman, saluran Drainase, dan gedung PAUD belum terealisasi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa yang rendah turut memperlambat proses pembangunan dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa.
10.	Juli Tiarma Br. Sihaloho, dkk (2025)	Strategi Pemerintah Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-undangan No. 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Tanjung Beringin I, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi)	Kualitatif Deskriptif	Bahwa pemerintah Desa Tanjung Beringin I telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, antara lain : menyesuaikan jadwal Musrenbang dengan aktivitas masyarakat, melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi. Namun, masih

I	II	III	IV	V
				terdapat beberapa faktor penghambat seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kondisi geografis yang sulit, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa sebagian besar kajian telah membahas peran dan strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur, termasuk perencanaan, pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian-penelitian tersebut juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta koordinasi antar lembaga desa dalam mendukung keberhasilan pembangunan infrastruktur. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menelaah strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan masih terbatas penelitian yang mengkaji keterkaitan antara strategi pembangunan infrastruktur dengan tingkat partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, khususnya dalam tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan.

Penelitian tentang strategi pemerintah desa di Tambun berbeda dengan penelitian terdahulu dengan adanya dinamika yang berbeda, seperti prioritas pembangunan jalan desa dan sistem drainase yang belum optimal, serta inisiatif pengelolaan lahan pembuangan sampah menjadi taman terbuka ramah anak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian tersebut dengan memberikan analisis mendalam mengenai strategi, hambatan, dan upaya pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tambun.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam “45” Bekasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan baru bagi mahasiswa maupun masyarakat dalam memahami strategi pembangunan infrastruktur desa Bagi Pemerintah Desa Tambun, hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan dengan sistematika penulisan skripsi yang akan dilakukan peneliti berdasarkan pada aturan sistematika yang sudah ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi, sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang akan diteliti dalam bentuk uraian. Kemudian bab ini membahas perumusan masalah sebagai fokus dari penelitian yang akan dilakukan demi mencapai hasil penelitian yang diharapkan dalam tujuan penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian yang mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dari penelitian ini terhadap masalah yang sudah di rumuskan. Signifikansi penelitian menguraikan tentang manfaat secara teoritis dan praktis juga

memaparkan peneliti-peneliti terdahulu yang menjadi referensi di penelitian ini. Dan yang terakhir ada sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembaca terkait dengan isi dari penelitian ini secara keseluruhan.

BAB II KERANGKA TEORI

Dimana pada bab ini berisi perspektif teoritik menguraikan tentang teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab problematika dalam penelitian ini yang bersumber dari buku-buku, internet dan lainnya, dan definisi – definisi teori tersebut. Kerangka pemikiran menggambarkan alur penelitian yang dikaji dengan teori yang relevan dalam penelitian, sehingga penelitian dapat merumuskan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan paradigma penelitian, metode penelitian kualitatif, desain penelitian, sumber dan teknik perolehan data, teknik analisis data, goodness dan quality criteria penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, dan keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan uraian mengenai gambaran umum objek penelitian, dilanjutkan dengan pemaparan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya, hasil tersebut dianalisis dan dibahas secara mendalam dengan mengaitkannya pada kerangka teori sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fokus penelitian.

BAB V SIMPULAN

Pada Bab terakhir bagian penutup dari keseluruhan rangkaian penelitian ini. Bab ini menyajikan simpulan yang menyimpulkan hasil penelitian, serta memuat saran dan rekomendasi yang bersifat konstruktif dan implementatif berdasarkan temuan dan keterbatasan yang teridentifikasi selama proses penelitian. Seluruh isi bab ini disusun secara singkat, padat, dan jelas untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.